

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Fenomena diskriminasi terhadap etnis Uighur di Cina menunjukkan bagaimana kekuasaan yang timpang dapat membentuk marginalisasi identitas dalam negara multietnis. Sebagai bagian dari retorika multikulturalisme yang dipromosikan pemerintah, terdapat praktik hegemoni budaya yang menempatkan etnis Han di tengah-tengah legitimasi identitas nasional. Dalam keadaan seperti ini, Uighur tidak hanya menghadapi represi dari segi politik dan ekonomi, tetapi juga menghadapi penghapusan dalam ruang mengekspresikan identitas kolektif mereka. Dalam upaya pemerintah untuk menyeragamkan perbedaan melalui kebijakan sinifikasi, kelompok minoritas Uighur menentangnya dengan membangun kesadaran kolektif yang berbasis identitas sebagai bentuk resistensi terhadap dominasi.

Melalui teori *resistance identity* Manuel Castells, etnis Uighur membangun strategi perlawanan kultural untuk memperjuangkan eksistensi mereka. Resistensi ini hadir melalui pelestarian budaya, karya, hingga gerakan diaspora Uighur. Dengan demikian, resistensi identitas Uighur tidak hanya menjadi sarana mempertahankan kebudayaan, tetapi juga wujud perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dan keadilan. Resistensi identitas etnis Uighur mencerminkan perjuangan kelompok *subaltern* untuk mengonstruksi eksistensinya dalam sistem yang menentang pluralitas. Dalam situasi ini,

perlawanan Uighur bukan hanya sebagai perjuangan untuk memproduksi identitas dan budaya, melainkan sebagai gerakan politik untuk menuntut pengakuan dan kesetaraan dalam sistem sosial yang menindas.

Penelitian ini menemukan bahwa kondisi *subaltern* etnis Uighur, yang dibentuk oleh *legitimizing identity* negara melalui kebijakan asimilasi paksa, tidak berhenti pada posisi pasif sebagaimana diasumsikan dalam banyak kajian sebelumnya. Sebaliknya, kondisi *subaltern* tersebut bertransformasi menjadi *resistance identity* kolektif yang bersifat defensif, di mana identitas digunakan sebagai instrumen politik non kekerasan untuk memperjuangkan eksistensi, dan martabat mereka. Temuan ini menegaskan bahwa subalternitas bukan sekadar hasil akhir dari dominasi struktural, melainkan merupakan kondisi dinamis yang memicu artikulasi politik identitas dalam konteks hegemoni multikultural negara.

